

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Situasi polaritas dalam hubungan internasional membawa suatu babak baru terhadap peran aktor negara maupun non-negara dalam merespon situasi yang terjadi di fora internasional. Polarisasi sistem internasional yang dahulu hanya berpusat di kawasan Amerika Utara dan Eropa pada saat ini mulai beralih menuju kawasan yang baru seiring dengan munculnya “Abad Asia”. Fenomena Abad Asia mendorong negara-negara dari berbagai belahan dunia untuk menyesuaikan diri dengan situasi politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi di kawasan Asia.

Menurut Kepala BPPK Kementerian Luar Negeri RI, Siswo Pramono dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia disebutkan bahwa Indo Pasifik merupakan perwujudan dari fenomena Abad Asia. Siswo mengatakan Indo-Pasifik yang termasuk ke dalam Abad Asia ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan polaritas Abad Amerika maupun Abad Eropa, yaitu pada segi fragilitas yang dimana Abad Asia masih sangat rentan akan perpecahan konflik kawasan maupun kontestasi antar kekuatan global (Pramono, 2018). Sependapat dengan Siswo, Heiduk melihat bahwa pergeseran yang terjadi dari wilayah Amerika-Eropa menuju Asia saat ini juga turut memperluas ragam kepentingan berbagai negara di kawasan maupun non-kawasan Indo-Pasifik agar dapat turut serta dalam arena tersebut (Heiduk & Wacker, 2020). Fragilitas, munculnya berbagai aktor dan kepentingan, pelebaran pengaruh geopolitik & geostrategis mendorong Indo-Pasifik menjadi lahan perhatian dunia yang baru.

Indo-Pasifik di tengah Abad Asia ini memiliki banyak peluang sekaligus tantangan bagi negara-negara yang menghadapi secara langsung fenomena ini. Bangkitnya Cina pasca kebijakan “*Open Door Policy*” membawa suatu kecemburuan sekaligus kekhawatiran bagi hegemon global yaitu Amerika Serikat beserta dengan *proxy-proxy*-nya di kawasan Indo-Pasifik. Konsep Indo-Pasifik itu sendiri bahkan pertama kali lahir dari

tetangga terdekat Cina – yang juga merupakan mitra dari AS yaitu India dan Jepang, yang memandang kebangkitan Cina merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan sehingga perlu adanya penguatan kerjasama antar samudra di kawasan Indo-Pasifik (Mukherjee, 2018). Mukherjee melihat bahwa kerjasama antara India dan Jepang tersebut selain untuk menahan realitas kebangkitan dari Cina, juga dapat dimanfaatkan sebagai kerjasama positif bagi stabilitas regional di kawasan Asia Timur & Asia Selatan. Melihat hal ini, maka menjadi sesuatu yang penting dan perlu digaris bawahi bahwa fenomena Indo-Pasifik yang didalamnya mendorong kebangkitan dan manuver politik internasional dari Cina dapat menimbulkan suatu percikan-percikan konflik maupun kontestasi antar negara di kawasan. Oleh karena itu didapati memang ada negara-negara yang secara keamanan merasa dilematis pada akhirnya membuat kerjasama sepaham.

Pada tataran kebijakan luar negeri dan studi hubungan internasional, Indo-Pasifik merupakan salah satu bentuk kawasan geopolitik yang terbentuk dari *mental mapping* para aktor kekuatan global dan kekuatan regional yang membentang dari wilayah Samudra Pasifik hingga Samudra Hindia (Wilkins & Kim, 2020). Menurut Wilkins & Kim, keberadaan Indo-Pasifik dirasa penting adanya oleh para aktor-aktor kebijakan luar negeri, mengingat meningkatnya intensitas peran-peran negara di Abad Asia oleh beberapa negara seperti Cina & India serta aktifnya jalur perdagangan, sumber daya, dan keamanan dunia dari wilayah Indo-Pasifik. Untuk mendukung pernyataan dari Wilkins & Kim, Morgan telah menempatkan dua *mental mapping* yang terbangun di tataran politik internasional terbaru saat ini di kawasan Indo-Pasifik yaitu *Belt Road Initiatives* dan *Free & Open Indo-Pacific* (Morgan, 2020). Dengan mengkorelasikan kedua fenomena di Abad Asia dan *mental mapping* para aktor kekuatan global dan regional terhadap kepentingan nasional mereka, maka dapat diasumsikan bahwa betapa pentingnya kawasan Indo-Pasifik sebagai wilayah dinamis yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai dasar-dasar pengambilan kebijakan luar negeri oleh suatu negara.

Setidaknya terdapat beberapa konstelasi peristiwa penting yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik sehingga menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang strategis dan hangat diperbincangkan oleh pengamat kebijakan luar negeri & aktor negara baik itu secara politis maupun ekonomi.

Secara politis keberadaan Indo-Pasifik menunjukkan adanya persaingan kekuatan & pengaruh geopolitik. Panasnya persaingan pengaruh antara AS & Cina semakin terpusat di kawasan Indo-Pasifik. AS dengan mitra liberal demokratik-nya yaitu *Quad* – yang kemudian berkembang menjadi *Free & Open Indo-Pacific* (FOIP) – terus menunjukkan pengaruhnya untuk melakukan pencegahan kepada setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh Cina terutama dengan program yang Cina gaungkan yaitu *Belt Road Initiatives* (BRI). Berkembangnya aliansi AUKUS menjadi kawasan ini menjadi semakin panas, mengingat pembelian kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia membawa suatu perilaku dilema keamanan bagi negara-negara lainnya di kawasan seperti Indonesia & Malaysia. Terkait dengan efek domino geopolitik lainnya dapat dilihat dari masih terus bergejolaknya penyerangan Cina ke Taiwan, program nuklir Korea Utara, kudeta Myanmar dan klaim Sembilan Garis Putus Laut Cina Selatan.

Selanjutnya jika ditinjau dari sisi ekonomi mengapa Indo-Pasifik menjadi pusat perhatian pada saat ini utamanya karena Indo-Pasifik berada pada pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Tiga kekuatan ekonomi terbesar seperti AS, Cina, Jepang berada di kawasan Indo-Pasifik. Belum lagi beberapa kekuatan ekonomi besar yang termasuk dalam *Group of 20* (G-20) seperti Indonesia, Korea Selatan, Australia dan India dalam aktivitasnya berada di kawasan ini (Rudd & Yudhoyono, 2020). Seperti halnya pedang bermata dua, Indo-Pasifik berada di dua mata antara menjadi motor perekonomian dunia atau pembawa dampak domino bencana ekonomi dunia. Hal ini dikarenakan kawasan Indo-Pasifik di dalamnya terdapat beraneka jalur perdagangan penting & negara-negara yang menjadi pasar terbesar dunia. Seperti yang disebutkan oleh IMF ketika AS dan Cina melakukan perang dagang, pada saat itu ekonomi global mengalami

pertumbuhan yang lambat jika dibandingkan pada krisis tahun 2008-2009 (Lawder & Shalal, 2019). Selain itu pesatnya investasi, pembangunan, dan konektivitas di kawasan tersebut juga sangat menentukan bergerak dan stabilnya ekonomi dunia.

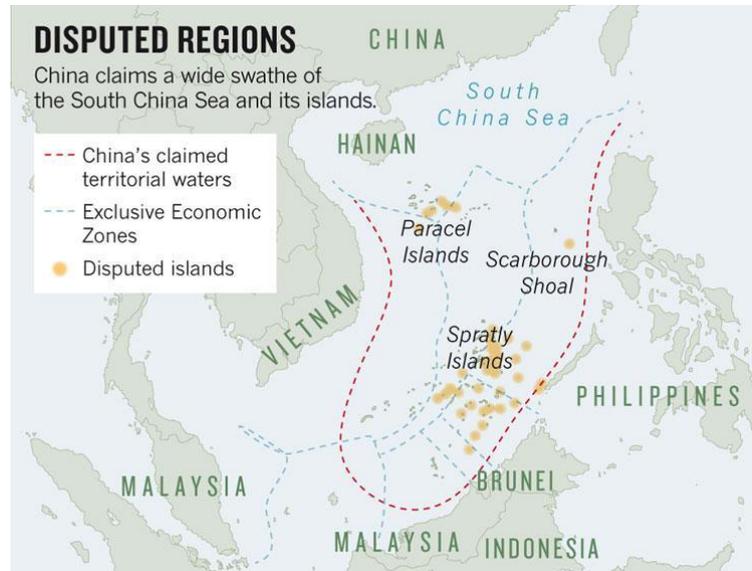
Berpijak pada peristiwa-peristiwa penting yang mewarnai konstelasi di kawasan Indo-Pasifik, ASEAN sebagai organisasi tunggal dan inklusif bagi negara-negara di Asia Tenggara maupun bersama mitra wicara-nya yang tergabung ke dalam *ASEAN Regional Forum* (ARF), mencoba memberikan penawaran atau solusi yang berbasis pada prinsip inklusivitas & penyelesaian masalah melalui dialog. Pada perjalanannya konsep yang dimiliki oleh ASEAN melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) diinisiasi oleh Indonesia sebagai aktor kunci kawasan pada tahun 2019 menuntut adanya inklusivitas, kerjasama dan penghormatan pada sentralitas ASEAN. *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* kemudian disepakati pada tahun 2019 pada rangkaian KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand. Adapun turunan domain kerjasama dalam dokumen tersebut antara lain maritim, konektivitas, SDGs dan kerjasama dalam bidang ekonomi lainnya (ASEAN, 2019).

Pentingnya kaitan konstelasi peristiwa dari keberadaan Indo-Pasifik dengan solusi & pandangan yang ditawarkan oleh ASEAN melalui empat poin kerjasama *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, hal ini dapat dilihat dari keempat poin yang terkandung di dalam dokumen *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (ASEAN, 2019). Empat poin kerjasama yang diharapkan dapat menjadi suatu implikasi oleh anggota-anggota ASEAN antara lain:

Pertama, kerjasama dalam domain maritim. Implikasi terkait dengan pentingnya kerjasama yang berada di kawasan Indo-Pasifik oleh ASEAN secara langsung menunjukkan keseriusan ASEAN untuk segera menyelesaikan sengketa-sengketa perbatasan yang berada di kawasan Laut Cina Selatan. Yang menjadi masalah dari adanya konflik Laut Cina Selatan ini sendiri ketika aktor yang turut bermain di dalamnya itu tidak hanya negara-negara anggota ASEAN, tetapi juga ada AS bersama mitra liberal demokratik-nya yang secara khusus bertindak sebagai hegemon tradisional

global untuk menahan pergerakan dan manuver Cina di kawasan Laut Cina Selatan.

Gambar 1 Peta Nine Dash Lines China



Sumber: International Strategic (2016)

Bagi ASEAN persoalan maritim di Laut Cina Selatan ini merupakan bentuk permasalahan regional khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Setidaknya lima negara anggota ASEAN yaitu Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia dan Indonesia terdampak akan klaim yang dimiliki oleh Cina. Persoalan Laut Cina Selatan jika ditinjau berdasarkan perspektif keamanan maritime tradisional, dapat membawa dampak domino yang lebih luas ketika *Quad* melalui *Free & Open Indo-Pacific (FOIP)* nya mengajak negara-negara seperti Filipina dan Vietnam untuk bergabung ke dalam mekanisme *Quad Plus* (Butcher, 2021).

Terkait dengan *Quad Plus*, Vasudeva dalam artikelnya menyebutkan bahwa pada awalnya secara strategik *Quad Plus* hanya berfokus pada penyelesaian isu kesehatan global yaitu pandemi, namun pada akhirnya secara politis dan ekonomis hal ini dirivnasikan dalam berbagai aspek salah satunya maritim untuk menghadang pergerakan dan pengaruh Cina (Vasudewa, 2020). Tentu saja ketidakpastian penyelesaian sengketa wilayah abu-abu atau tumpang tindih perselisihan batas laut di Laut Cina Selatan inilah yang seharusnya dapat membuat *ASEAN Outlook*

on the Indo-Pacific sebaiknya dijadikan sebagai wadah penyedia solusi secara damai dan kebijakan yang dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang berpotensi mengarah kepada ancaman perang terbuka antar negara.

Tidak hanya bagi persoalan-persoalan keamanan maritim tradisional, juga harus mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada pada ancaman-ancaman maritim non-tradisional. Tidak perlu jauh untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman yang ada di kawasan Indo-Pasifik, ASEAN sendiri memiliki beberapa ancaman non-tradisional di wilayah kelautannya. Ancaman-ancaman tersebut antara lain seperti pembajakan, & terorisme maritim di kawasan Laut Sulu, perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang, penyelundupan senjata dan perbudakan (Guan & Skogan, 2007; Liss, 2013). Ancaman-ancaman non-tradisional tersebut bersifat lintas negara dan tidak jarang negara-negara anggota ASEAN membentuk kerjasama tiga negara seperti contohnya Indonesia-Malaysia-Filipina di wilayah Laut Sulu.

Posisi dalam menghadapi tantangan-tantangan maritim yang ada baik itu secara tradisional maupun kontemporer, ASEAN masih berada pada tahap pendataan ancaman. Secara *status quo* situasinya masih kondusif dan dapat tertangani di level regional (Ridho & Sudirman, 2020). Namun dengan adanya peningkatan intensitas akan kepentingan di kawasan Indo-Pasifik, bukanlah tidak mungkin apabila aktor-aktor ancaman maritim akan semakin bervariasi dan mengancam stabilitas kawasan yang ada. Melihat situasi ini pertanyaannya adalah apakah *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* mampu menjadi jalan atau solusi dalam membentuk kerjasama kerangka keamanan maritim yang terotomatisasi di kawasan Indo-Pasifik ketika diperhadapkan dengan aktor-aktor ‘besar’ dan ancaman yang semakin beragam. Ujian implikasi poin kerjasama maritim ini mungkin akan tergantung pada *confidence building measure* dan sikap dari anggota ASEAN itu sendiri terhadap kerjasama maritim yang ada. Implikasi maritim *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* yang tertuang dalam dokumen pada saat ini masih berkisar pada keamanan maritim, belum mengarah pada implementasi perekonomian maritim atau *blue economy* secara riil.

Kedua, kerjasama dalam domain SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Implikasi dari adanya kerjasama ini tentu tidak terlepas dari keberadaan penting Indo-Pasifik sebagai sorotan global, yang harus mampu mengakselerasi SDGs dalam konteks multilateralisme. Secara aktual, situasi SDGs dan implementasi SDGs oleh negara-negara yang terlingkup dalam kawasan Indo-Pasifik sebenarnya masih dapat dilihat terjadi kesenjangan antar satu negara terhadap negara lainnya. Laporan UNESCAP pada tahun 2021, menunjukkan bahwa pertumbuhan SDGs mungkin hanya mampu mencapai 10% saja di tahun 2030 dengan uraian 9 dari 104 target yang diharapkan dapat diraih (Pandey, 2021). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* memiliki perhatian pada implikasi Indo-Pasifik terhadap SDGs ini, yang dimana kerjasama-kerjasama SDGs seperti pada poin 6,9,14,16, dan 17 dapat terimplementasikan dengan baik oleh seluruh aktor. *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* pun juga berharap agar kesenjangan antar-negara pada target SDGs di semua wilayah Indo-Pasifik dapat diminimalisir.

Ketiga, kerjasama konektivitas. Seperti yang diketahui bahwa negara-negara ASEAN maupun yang berada dalam lingkaran Indo-Pasifik merupakan negara-negara kepulauan maupun maritim. Konektivitas maritim dalam bentuk peningkatan kapasitas dan akomodasi pada pelabuhan, transportasi, jaringan rantai suplai, ukuran kapal & logistik, keamanan kapal, dukungan jaringan digital dan sebagainya sangat diperlukan sebagai pendukung sarana maupun prasarana aktivitas perdagangan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Pada implikasinya, wilayah Indo-Pasifik yang didalamnya ada ASEAN menyumbang setidaknya 65% GDP dunia & 46% produk perdagangan dunia (De, 2019). Dapat dilihat betapa pentingnya dukungan dan peningkatan sarana prasarana di kawasan Indo-Pasifik khususnya di wilayah ASEAN melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, mengingat terdapat beberapa pelabuhan-pelabuhan penting dan strategis di sekitar jalur dagang Selat Malaka yang tentu akan membawa dampak & nilai pertumbuhan positif bagi kawasan.

Dokumen *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* sendiri menyatakan bahwa visi ini dapat mendukung kerjasama-kerjasama seperti *Indian Ocean Rim Association*, *Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation* (BIMSTEC), *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA), *Mekong Cooperation*, *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan sebagainya (ASEAN, 2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* secara tidak langsung juga menyiratkan bahwa program yang diusung oleh Amerika Serikat, Cina maupun negara-negara lainnya dapat diterima asalkan untuk pembangunan konektivitas untuk mengurangi kesenjangan, bukan untuk persaingan. Tentu program-program yang kemudian akan ditawarkan bagi pembangunan konektivitas di Indo-Pasifik harus relevan dengan target ASEAN MPAC 2025.

Keempat, kerjasama dalam bidang ekonomi dan area-area lainnya. Implikasinya kepada Indo-Pasifik disesuaikan dengan agenda-agenda yang tertera di dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Negara-negara yang berada di Asia Tenggara dan wilayah Indo-Pasifik sekitarnya merupakan negara-negara yang berpotensi dalam memperoleh investasi karena perkembangan & pembangunan tersebut semakin vital & pesat. Isu-isu seperti penguatan Kerjasama Selatan-Selatan Triangular, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi digital, riset, perubahan iklim, dan kesehatan menjadi implikasi yang juga penting diperhatikan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam kawasan Indo-Pasifik.

Berbagai peristiwa konstelasi yang ada baik itu secara umum untuk Indo-Pasifik sendiri dari sisi politik dan ekonomi, yang kemudian diturunkan dengan implikasi poin-poin kerjasama yang disepakati oleh ASEAN melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, memiliki banyak peluang dan tantangan secara geopolitik & geostrategis bagi para negara atau aktor-aktor yang terlibat.

Setiap negara memiliki harapan pada visi Indo-Pasifik nya masing-masing. Mengenai strategis dan efektivitas visi tersebut maka harus dilihat

dari sisi bagaimana *regional views* negara-negara yang terlibat langsung di dalam pelaksanaan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* ketika memandang posisi dan peran mereka dalam sirkulasi geopolitik & geostrategis di kawasan Indo-Pasifik. Untuk menjawab hal tersebut, karena penelitian ini dibatasi dalam skala pelaksanaan kebijakan luar negeri RI maka fokusnya hanyalah terkait dengan status & implementasi oleh RI terhadap *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Setidaknya saat ini sudah terdapat beberapa literatur yang membahas tentang kebijakan luar negeri RI terhadap Indo-Pasifik, khususnya *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.

Literatur pertama diawali dengan literatur yang dibahas oleh Dewi Fortuna (Anwar, 2020), dengan judul artikel "*Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific*." Dapat dikatakan bahwa artikel ini merupakan telur dari artikel-artikel lainnya yang membahas kebijakan luar negeri RI terhadap *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Dewi Fortuna Anwar membahas bahwa saat ini Indonesia telah mengambil posisi kepemimpinannya terhadap Indo-Pasifik melalui gaung Poros Maritim Dunia & pelebaran kanvas dari Asia Pasifik menuju Indo-Pasifik. ASEAN dan Indonesia memiliki kecenderungan untuk tidak berporos, sebagai strategi untuk mendapatkan & melindungi nilai dan manfaat dari negara yang sedang berkontestasi yaitu AS dan Cina. *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* menurut Indonesia dirancang sebagai usaha untuk menjaga sentralitas ASEAN yang gunanya untuk memastikan Indo-Pasifik sebagai arsitektur kawasan yang inklusif, transparan dan bersifat menjembatani. Adapun faktor mengapa Indonesia tertarik untuk menunjukkan 'bendera'-nya pada fenomena Indo-Pasifik ini sendiri menurut Dewi Fortuna Anwar antara lain: (1) Presiden Joko Widodo memiliki ambisi daya dorong baru bagi pengembangan konsep Poros Maritim Dunia; (2) menguatkan kembali polugri bebas aktif yang bersifat *omnidirectional*; (3) mempertegas posisi ASEAN sebagai bagian soko guru kebijakan luar negeri RI; dan (4) menunjukkan posisi *middle-power* Indonesia melalui tipologi Kantian yang mengutamakan kerjasama dibandingkan rivalitas melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.

Indonesia menginisiasi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* sebagai mekanisme dan blok bangunan bagi pengaturan norma dan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN di kawasan Indo-Pasifik. Dapat diilhami bahwa inisiasi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo ini menandai kegiatan aktivisme kebijakan luar negeri kekuatan menengah yang ditawarkan oleh Indonesia dengan menjadikan sentralitas ASEAN sebagai kendaraannya. Penulis melihat bahwa inisiasi ini dapat menjadi batu sandungan sekaligus batu loncatan bagi kebijakan luar negeri RI yang dikenal dengan karakter bebas-aktifnya, karena keberhasilannya hanya bisa ditentukan dengan implementasi dan sikap negara-negara lainnya terhadap *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Peluang yang besar dapat diperoleh apabila secara simultan kepemimpinan Indonesia diakui melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, kemudian sentralitas ASEAN menjadi kuat, dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* dapat dijadikan sebagai strategi kemitraan yang dapat mengimbangi politik para kekuatan besar. Di sisi lain secara senjang dari artikel tersebut, penulis masih belum melihat bagaimana sikap atau posisi realistis Indonesia sebagai negara kekuatan menengah apabila menghadapi peristiwa-peristiwa yang memiliki urgensi keputusan tinggi seperti konflik regional atau perang yang sewaktu-waktu dapat terjadi di kawasan Indo-Pasifik.

Mengenai *middle-power* Indonesia terhadap inisiasi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, Scott (2019) dalam artikel yang berjudul “*Indonesia Grapples with the Indo-Pacific: Outreach, Strategic Discourse, and Diplomacy*” menunjukkan pesimisme dan kritik dengan peran yang dilakukan oleh Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Melalui pendekatan aktor strategis, wacana strategi, dan diplomasi Indonesia di Indo-Pasifik, Scott melihat bahwa Indonesia walau dalam kondisi ‘naik daun’ di panggung konstelasi Indo-Pasifik, secara domestik *branding* konektivitas dan maritim yang dimiliki oleh Indonesia masih lemah. Ia menilai bahwa sulit untuk mengatakan inisiasi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* dapat menjadi modal kepemimpinan *middle-power* Indonesia di ASEAN. Dari sisi kelembagaan, Scott juga melihat bahwa walaupun *ASEAN Outlook on*

the Indo-Pacific sudah disusun sedemikian rupa, ASEAN masih memiliki kelemahan: sentralitas & kelembagaan. Hal ini dapat mencemari nafas *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* yang bersifat inklusif, sedangkan pada faktanya negara-negara yang terlibat sebagian besar didominasi oleh tekanan program *Belt & Road Initiatives* (BRI) yang dimiliki Cina.

Kedua literatur di atas sama-sama menunjukkan adanya sikap dan status kebijakan luar negeri RI terhadap Indo-Pasifik, khususnya dengan diinisiasinya *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Namun, bagaimana dengan konstruksi kebijakan luar negeri & geopolitik RI terhadap konstelasi di kawasan Indo-Pasifik? Pertanyaan tersebut telah diulas langsung oleh tiga literatur yang dibahas oleh (Fathun & Nashir, 2021; Pangestu et al., 2021; Saputra & Sudirman, 2020). Untuk menjembatani sikap RI terhadap konstelasi di kawasan Indo-Pasifik ketiga literatur tersebut sama-sama bersepakat memandang bahwa Indo-Pasifik ini merupakan awal mula dari abad geopolitik, yang dimana Indonesia harus terlibat aktif dalam forum-forum internasional baik bilateral maupun multilateral bagi diplomasi Indo-Pasifik. Pada bagian ini untuk melihat realita yang ada, walaupun ada kesepakatan pandangan dari tiga literatur tersebut, terdapat hal menarik yang penulis ulas dalam melihat perbedaan pendekatan konstruksi kebijakan luar negeri & geopolitik RI yang dibahas oleh ketiga literatur tersebut.

Fathun & Nashir dalam salah satu bagian buku dengan topik “Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik”, membawa suatu pendekatan khusus dalam mengkonstruksikan Indo-Pasifik melalui variabel-variabel yang disusun oleh (K. Holsti, 2016). Variabel-variabel tersebut mencakup: tampilan militer, struktur hubungan, faktor domestik, latar belakang sejarah, sikap elit, proses pembuatan kebijakan, persepsi kebijakan, faktor kepribadian, tindakan menuju, tindakan restrukturisasi dan kebijakan pelepasan dari kebijakan luar negeri RI khususnya di era Presiden Joko Widodo. Selain itu, Fathun & Nashir juga memberikan susunan komparasi dari kebijakan luar negeri RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono & Presiden Joko Widodo terkait

dengan pandangannya terhadap Indo-Pasifik. Disebutkan bahwa kebijakan luar negeri RI di era Presiden Joko Widodo mengalami pergeseran dari Presiden SBY, yaitu dari globalis menjadi bilateralis. Perubahan tersebut disandingkan oleh Fathun & Nashir berdasarkan teori empiris hasil “*change from to charge to*” yang dikatakan bahwa kebijakan luar negeri RI di era Presiden Joko Widodo telah memenuhi tiga syarat: *self reliance*, *dependence*, dan *diversification*. Penulis melihat bahwa literatur ini membawa warna dalam perumusan kebijakan luar negeri RI khususnya pada isu Indo-Pasifik, mengingat dicurahkan beberapa faktor seperti dependen, independen, dan komparasi kebijakan luar negeri RI antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. *Indonesian Foreign Policy Post-ASEAN* menjadi salah satu kata kunci besar terkait dengan visi Indonesia terkait Indo-Pasifik, namun di sisi lain pragmatisme dan modal kekuatan *middle power* Indonesia harus dapat dibuktikan secara riil apabila Indonesia ingin mencapai visi perluasan tersebut melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.

Sedikit berbeda dengan pendekatan yang diusung oleh Fathun & Nashir pada literatur sebelumnya, Pangestu et.al. membawa konstruksi pembentukan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* didasari pada model yang diusung oleh William D. Coplin. Proses pengusulan dan pembentukan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* didasari pada strategi kolaborasi *accommodation strategy & leadership strategy*. Indonesia dengan strategi bebas-aktif yang dimiliki, memiliki karakter untuk mengakomodasi semua kepentingan yang ada atau dalam artian disini yaitu inklusif. Selain itu *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* juga dicetuskan sebagai katalisator dan jembatan dari perdamaian di kawasan Indo-Pasifik yang terkesan ‘panas’. Indonesia berdasarkan pendekatan rasionalnya hanya mengusung pada strategi *soft-power* dan menolak keras strategi *hard-power*. Dengan diadopsinya *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* ini, Langgeng et. al. memandang bahwa dengan disepakatinya inisiasi ini, maka Indonesia telah berhasil dalam memiliki peran sentral di ASEAN. Penulis disini melihat bahwa ada nilai-nilai historis & pendekatan rasional yang digunakan oleh

Presiden Joko Widodo dalam menginisiasi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, yang tentu dapat dilihat sebagai sebuah langkah kemajuan menunjukkan peran Indonesia di kancah ASEAN & Indo-Pasifik.

Berikutnya dengan konstruksi geopolitik Indonesia terhadap situasi di kawasan Indo-Pasifik. Saputra & Sudirman dalam artikelnya yang berjudul “Pengembangan Konsep Indo-Pasifik: Sebuah Konstruksi Geopolitik Indonesia di Kawasan Melalui ASEAN”, menekankan pada pendekatan geopolitik kritis (*critical geopolitics*) yang melihat kebijakan luar negeri RI dengan menginisiasi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* didasari pada persepsi aktor terhadap Indo-Pasifik. Peran aktor berbasis pada konstruktivisme sangat diperjelas dalam artikel ini, yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa aktor kebijakan luar negeri RI yang terus mempromosikan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* dalam bentuk *speech act* di kancah bilateral maupun multilateral. Selain itu Saputra & Sudirman juga menyebutkan bahwa *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* yang diinisiasi Indonesia memiliki ciri khas-nya tersendiri yaitu membawa suatu asas yaitu kerjasama bukan persaingan, yang dilandasi oleh kepentingan RI sebagai negara maritim dan bebas-aktif. Penulis memiliki asumsi pada artikel ini bahwa *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* dengan ciri khas mekanisme ASEAN seharusnya dapat digunakan mitra wicara ASEAN khususnya AS & Cina ketika membicarakan Indo-Pasifik. ASEAN merupakan sekumpulan negara-negara yang harus dilibatkan dan tidak boleh dipinggirkan perannya. Bagi Indonesia sendiri, ini dapat menjadi kesempatan emas dan keberhasilan besar kebijakan luar negeri RI apabila *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* memang dapat diimplementasikan secara baik dan lancar.

Dari paparan literatur-literatur yang ada mengenai Indonesia, ASEAN dan Indo-Pasifik, terlihat bahwa kajian Indo-Pasifik berdasarkan perspektif negara-negara anggota ASEAN khususnya Indonesia sebagai inisiator sangat menarik untuk diteliti. Namun, pada konteks ini penulis masih menemukan adanya celah karena belum adanya akademisi yang

menulis faktor-faktor proses pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai inisiator *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* terhadap butir-butir yang terkandung di dalam isi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* seperti maritim, konektivitas, SDGs, dan bidang ekonomi & bidang terkait lainnya. Pada beberapa kesempatan bahkan Presiden Joko Widodo dalam pidato yang berkaitan dengan pertemuan bilateral maupun multilateral, selalu membawa kepentingan nasional dengan argumen isi butir-butir *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* tersebut. Hal ini menarik untuk diteliti untuk mendalami alasan dari proses pengambilan kebijakan luar negeri RI yang dihipung berdasarkan prinsip polugri yang dipegang teguh oleh Indonesia.

Selain itu juga secara teoritis, belum ada satu pun akademisi yang menggali fenomena kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2017-2021 dalam menginisiasi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* dengan mempertimbangkan isi empat butir implementasi, melalui analisis *model decision making* poliheuristik yang diusung oleh Alex Mintz.

Analisis poliheuristik dapat digunakan untuk meninjau pertimbangan-pertimbangan kebijakan luar Indonesia dari kombinasi kognitif dan rasional berdasarkan pilihan-pilihan alternatif kebijakan yang ada pada *meso-level* secara umum masyarakat Indonesia di tahun 2017-2021. Penelitian ini akan menggali apa sajakah faktor-faktor dan implikasi yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menginisiasi dan mengimplementasikan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* berdasarkan tinjauan poliheuristik.

Penggunaan tinjauan poliheuristik dalam penelitian ini didasari oleh temuan dalam literatur-literatur sebelumnya serta harapan dan implikasi dari permasalahan penelitian yang telah membahas masalah di atas dari berbagai sudut pandang. Pada penelitian ini penulis dengan basis *application spotting of research gap* akan mencoba menggali sudut pandang kontemporer yang belum pernah dibahas oleh penelitian lainnya terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia dan posisinya terhadap *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Ini diharapkan agar penulis dapat menemukan

akar dan alur kebijakan luar negeri Indonesia di Indo-Pasifik dalam memprediksi peluang dan tantangan yang dihadapinya.

1.2 Rumusan Masalah

Kawasan Indo-Pasifik yang secara strategis berkembang dari bangkitnya Abad Asia dan bergesernya sumber daya kebutuhan negara-negara Barat-Utara ke negara-negara Timur-Selatan mengubah peta geopolitik dan geostrategis dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi dan peran tersendiri terhadap Indo-Pasifik melalui kebijakan luar negeri-nya. Secara *status quo*, Indonesia telah menetapkan pilihan kebijakan untuk menginisiasi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Tentu dalam inisiasi tersebut terdapat faktor-faktor pengaruh kebijakan luar negeri Indonesia yang secara poliheuristik mempertimbangkan peluang dan konsekuensi berdasarkan alternatif-alternatif kebijakan yang ada diukur dengan pilihan rasional dimensi politik, ekonomi, dan keamanan yang memiliki keuntungan unggul bagi kepentingan RI. Oleh karena itu, untuk mendeskripsikan bagaimana pilihan kebijakan RI cenderung memilih ASEAN melalui inisiasi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, penulis mengambil rumusan masalah yaitu:

“Bagaimana proses poliheuristik pengambilan kebijakan luar negeri RI dalam menginisiasi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan proses pertimbangan pengambilan kebijakan luar negeri RI dalam menginisiasi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* berdasarkan tinjauan poliheuristik. Adapun tujuan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a) *Tujuan Teoritis*. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori-teori seperti kebijakan luar negeri & poliheuristik yang efektivitasnya diuji melalui studi kasus Indo-Pasifik.

- b) *Tujuan Praktis*. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami proses (*process-tracing*) dari kebijakan luar negeri RI terhadap Indo-Pasifik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat secara akademis & praktis, yaitu secara rinci:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada literatur-literatur terkait kebijakan luar negeri Indonesia dan studi kawasan Indo-Pasifik. Selain itu secara informatif, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan atau ilmu bagi civitas akademika di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, khususnya bagi dosen dan mahasiswa di program studi Ilmu Hubungan Internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Produk riset dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan saran dan informasi mengenai kebijakan luar negeri Indonesia & studi kawasan Indo-Pasifik yang dibutuhkan oleh pemerintah, akademisi, lembaga riset, maupun juga masyarakat luas dalam konteks keilmuan.

1.5 Sistematika Penulisan

- Bab 1** Di dalam bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika dari penulisan skripsi.
- Bab 2** Di dalam bab ini menjelaskan konsep-konsep antara lain yaitu kebijakan luar negeri & poliheuristik serta kerangka pemikiran dari penelitian.

- Bab 3** Di dalam bab ini menjelaskan metode penelitian yang antara lain mencakup objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.
- Bab 4** Di dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Indo-Pasifik, asal muasal munculnya gagasan geopolitik Indo-Pasifik secara tradisional dan modern, peran kekuatan besar di Indo-Pasifik dan peran ASEAN sebagai posisi sentral di Indo-Pasifik.
- Bab 5** Di dalam bab ini secara lebih lanjut akan membahas momentum peran kebijakan luar negeri RI di Indo-Pasifik dan proses poliheuristik kebijakan luar negeri pemerintah RI terhadap Indo-Pasifik dari segi *meso-level*.
- Bab 6** Di dalam bab ini akan berisikan kesimpulan penelitian dan rekomendasi atau saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.